

**STUDI KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN
DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**Dewi Marlina
NIM: 210802129**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang menandatangani

Nama : Dewi Marlina
NIM : 210802129
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Saya dengan tegas menyampaikan bila dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tanpa mempergunakan konsep orang lain tanpa kemampuan untuk menguraikan dan membenarkannya.
2. Tidak mengambil karya tulis orang lain.
3. Tidak mempergunakan kontribusi orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya atau memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pemiliknya.
4. Tidak terlibat dalam manipulasi atau pemalsuan data.
5. Saya secara pribadi terlibat dalam karya ini dan bertanggung jawab penuh atas karya tersebut.

Jika di kemudian hari timbul tuntutan dari pihak lain terkait karya saya, dan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang kredibel yang mengarah pada penetapan pelanggaran pernyataan ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Dengan ini saya menyatakan pernyataan ini dengan sepenuh hati.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Dewi Marlina.

**STUDI KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN
DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulis
Skripsi Pada Program Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Dewi Marlina

210802129

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Said Amirulkamar,MM.,M.Si

NIP:196110051982031007



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed

NIP:197810162008011011

**STUDI KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN
DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

DEWI MARLINA

210802129

Sudah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Pemerintahan
Pada Hari/Tanggal: Jum'at 22 Agustus 2025

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr.Said Amirulkamar,MM.,M.Si

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed

NIP:196110051982031007

NIP:197810162008011011

Penguji I

Penguji II

Ferry Setiawan,S.E.,AK.,M.Si

Putri Marzaniar,MPA

NIP:197802032005041001

NIP:199811022024032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN AR-Raniry Banda Aceh


Dr.Muji Mulia,M.Ag
NIP:197403271999031005

ABSTRAK

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang sangat penting, karena di pesantren generasi bangsa bisa membentuk karakter, moral, dan ilmu pengetahuan tentang agama. Namun tidak sedikit pula pesantren- pesantren di berbagai daerah kurang berkembang salah satunya di Kabupaten Simeulue, yang mana di kabupaten simeulue masih banyak pesantren yang kurang berkembang baik dikarenakan dana ataupun sarana dan prasarananya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantren dan juga peraturan gubernur bupati simeulue pada tahun 2023. Akan tetapi walaupun telah lahir Undang-Undang dan tersebut masih banyak pesantren-pesantren yang kurang berkualitas terutama di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pesantren berdasarkan teori kebijakan indikator sarana prasarana, kualitas pendidik, kurikulum. Hal ini di tandai dari indikator di atas harus lebih diperhatikan lagi. Hambatan-hambatan yang dihadapi juga sangat banyak dana, tenaga pendidik. Rekomendasinya ialah pemerintah sedikit lebih memperhatikan pendidikan pesantren, dan melakukan program pembinaan kepada pendidik.

Kata Kunci: *kebijakan pemerintah, Pendidikan, pesantren,*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**STUDI KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN DI KABUPATEN SIMEULUE**” dengan waktu yang tepat. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan studi akademik dan perolehan nilai dalam mata kuliah tesis. Selama proses penyusunan tesis ini, peneliti mendapatkan dukungan, arahan, dan bimbingan yang sangat berarti dari keluarga, dosen, dan berbagai pihak lainnya, yang semuanya berperan penting dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN AR-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN AR-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN AR-Raniry Banda Aceh

5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku dosen pembimbing 2 dan pembimbing Akademik di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
6. Seluruh dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
7. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi hidup saya, yang selalu mendoakan saya tanpa hentinya, selalu memberikan semangat, kasih sayang dan cinta kasih mereka yang membuat saya bertahan sampai saya mampu menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga atas dukungan moral dan materinya selama ini yang menjadi landasan utama dalam perjalanan pendidikan
8. kepada Abang Kakak dan Adik saya yaitu abang Rahmat Indra Sari S.Pd, Almarhumah kakak Yenila S.Pd, Yuli Agusriani dan Yulli Malina S.Si dan juga adik saya Ade Irwansyah saya yang juga selalu mendoakan saya dan memberikan semangat di setiap saya mengeluh, yang selalu ada di saat saya lelah dan selalu menjadi garda terdepan di saat saya kesulitan.
9. kepada sahabat-sahabat saya, Zahara Al-hamid, Nurul Mawaddah, Naylun Hayatun, Sarni, dan Siti Aminah yang selalu memberikan saya semangat dan bersedia selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah dan menemani perjuangan saya

10. Kepada Narasumber yang telah meluangkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya kepada saya untuk diwawancarai dalam memberikan informasi terkait penulisan skripsi saya.

11. Dan tidak lupa pula *A Huge Thanks To Myself* terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mampu bertahan sejauh ini terima kasih sudah kuat dalam menghadapi banyaknya tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan yang cukup mengajarkan saya bagaimana berjuang dan tidak mudah putus asa terus berusaha untuk memberikan yang terbaik.

Peneliti sadar bila tugas akhir ini belum benar-benar sempurna. Untuk itulah, peneliti membuka diri bagi siapapun yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan guna untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan Pendidikan Berbasis Pesantren di Daerah-Daerah terpencil. Akhirnya, peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa setiap langkah yang dilakukan. Aamiin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025
Peneliti,

DEWI MARLINA
21080212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Rumusan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian	14
1.5. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Teori/Konsep	16
2.2. Kebijakan Pengembangan Pesantren	19
2.3. Hambatan Pengembangan Pendidikan Berbasis Pesantren	20
2.4. Penelitian Terdahulu	22
2.5. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Sumber Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Informan	34
3.6. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil penelitian	45
4.1.1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama	45
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Dayah	48

4.1.3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan.....	51
4.1.4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.5. Pondok Pesantren Darul Aitami.....	57
4.1.6. Pondok Pesantren Raudhatul Ma'wa Al-Aziziyah.....	61
4.2. Hasil Penelitian.....	63
4.3. Pembahasan.....	74

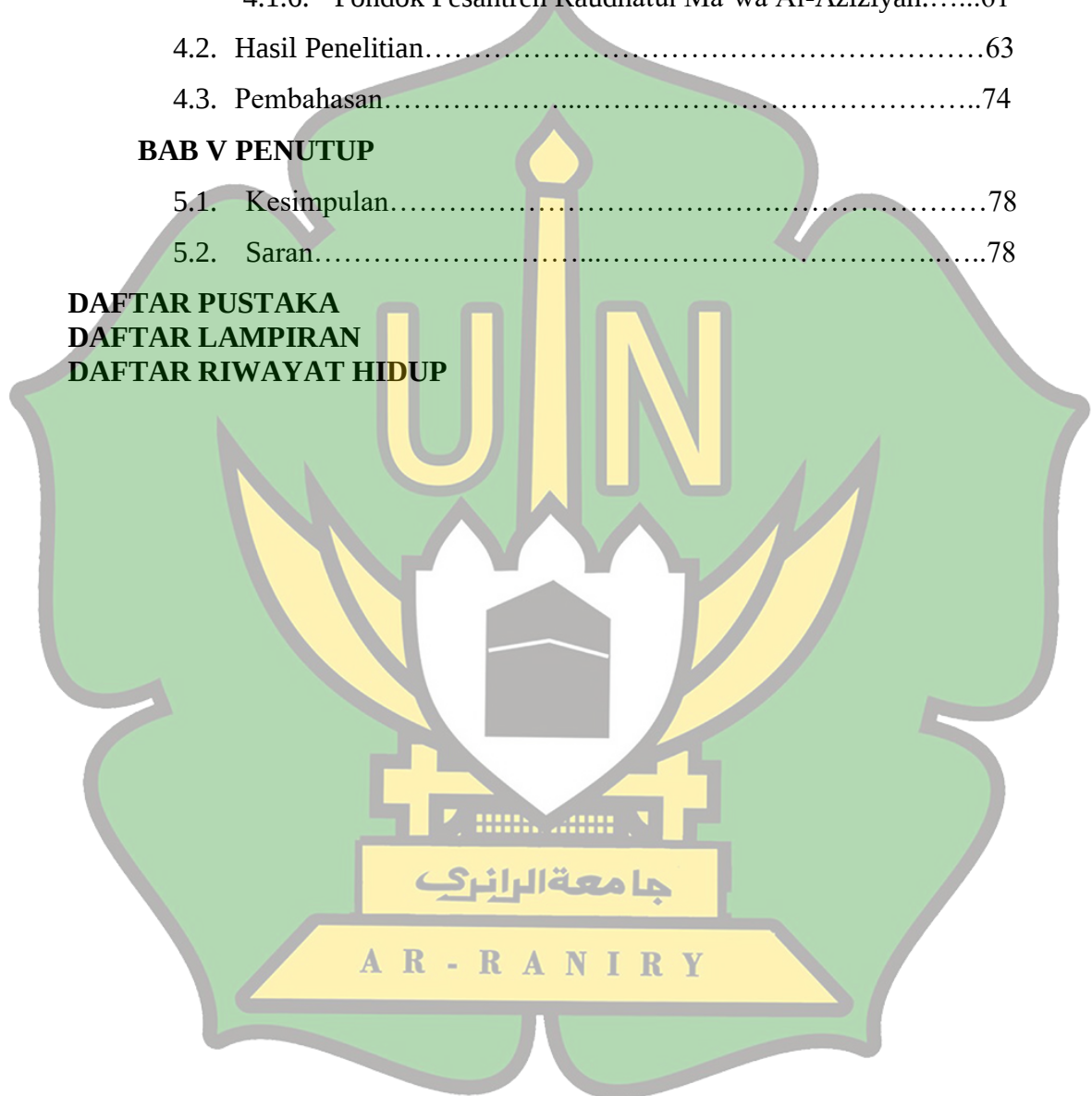
BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan adalah sarana atau jembatan untuk manusia agar dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang di dapat. Sebagaimana yang kita ketahui, tertuang di dalam UUD 1945 pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Jadi, sudah jelas bahwa pendidikan itu merupakan hak setiap individu untuk mendapatkannya.

Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa dengan pribadi yang cerdas dan berkualitas yang artinya generasi yang mampu memanfaatkan kemajuan yang ada dengan sebaik mungkin. Dan juga tercipta generasi yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Tanpa adanya pendidikan, tidak akan ada yang namanya kemajuan.

Maka dari itu, pendidikan sangat penting dan wajib diberikan kepada setiap warga negara sejak dini. Pendidikan juga merupakan suatu hal penting bagi sebuah negara agar dapat berkembang pesat. Negara-negara yang maju biasanya negara yang memprioritaskan pendidikan bagi warga negaranya. Dengan harapan dengan adanya pendidikan, maka kesejahteraan warga negaranya akan terjamin. Tetapi, pendidikan juga tidak akan berbuah

kemajuan apabila sistem dari pendidikan tersebut tidak tepat. Sama hal nya seperti di Indonesia¹.

Pendidikan juga merupakan upaya bangkit untuk pemerataan dan meningkatkan potensi pelajar guna mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui Bersama dan kita liat, kualitas pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain saat ini sangat mengkhawatirkan. Kasus pendidikan kini yang kita rasakan yaitu rendahnya kualitas pendidikan pada beragam tingkatan pendidikan, baik formal maupun informal, akibat hilangnya sumber daya manusia. yang memiliki pengalaman dan keterampilan untuk menghadapi perkembangan di berbagai bidang.

Mutu pendidikan ialah kebutuhan dan syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar tercapainya tujuan tersebut, upaya peningkatan mutu pendidikan harus bersifat siklis, terencana dan dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan pendidikan. Kinerja sekolah dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar harus ditingkatkan².

Pendidikan Islam sudah mendapat prioritas utama masyarakat muslim sejak awal perkembangan Islam. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan pendidikan Islam yang lahir dan tumbuh sejalan dengan

¹ Siti Fadia Nurul Fitri, 'Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.1 (2021), 1617–20.

² Lestari Eko Wahyudi and others, 'Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1.1 (2022), 18–22
<<https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i1.3>>.

berkembangnya agama Islam di Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi sangat berperan dalam mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dengan sistem yang sederhana dan dilakukan secara informal. Hal ini disebabkan agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam dan setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran Islam³.

Pendidikan Islam dalam pengertian institusi, maka yang dimaksud adalah institusi-institusi pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Madrasah sebagai sekolah Umum berciri khas Islam. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren, diantaranya: (1) pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. Ini tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa menuntut ilmu agama akan lebih mumpuni jika mondok di pesantren, (2) pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif (penggabungan) dan komprehensif (menyeluruh). Ini bisa dilihat dari perpaduan ilmu dengan moralitas santri, (3) tidak dibatasinya usia peserta didik, pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam, (4) mengutamakan kejujuran, keikhlasan dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran, (5) persaudaraan sebagai watak santri dilihat dari

³ Yusri M. Daud, 'Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Historis)', *Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry*, 10.2 (2021), 1–9.

kebersamaan santri dalam pondok pesantren dengan satu kamar berpenghuni banyak dan makan bersama dengan menu seadanya.

Pesantren merupakan wadah proses pembelajaran dilakukan dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik, serta menginternalisasi pengetahuan melalui sistem pembelajaran asrama yang memiliki tradisi khas. Awalnya, pesantren didirikan sebagai lembaga pembelajaran dan pengajaran agama Islam dengan tujuan untuk mempersiapkan individu dalam menyebarkan agama Islam. Namun, seiring perkembangannya, sebagian besar institusi ini telah bertransformasi menjadi lembaga pembelajaran alternatif yang menyediakan layanan pendidikan madrasah dan sekolah, tetapi tetap mempertahankan dan menghormati tradisi-tradisi khas yang ada⁴. Pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya. Salah satu keunikan tersebut adalah sistem nilai yang telah dikembangkan selama berabad-abad dan masih bertahan hingga saat ini.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Sejak zaman dahulu, pesantren telah berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan pengetahuan agama masyarakat. Dengan adanya pesantren, generasi muda bukan sekadar diajarkan mengenai ilmu agama, melainkan mengenai nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi landasan dalam kehidupan

⁴ Rizki Ayu Amaliah, Bahaking Rama, and Muhammad Yahdi, 'Lembaga Pendidikan Pesantren Di Indonesia: Islamic Boarding School Education Institutions in Indonesia', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 18.2 (2023), 101–7 <<https://doi.org/10.56338/iqra.v18i2.3771>>.

bermasyarakat. Namun, perkembangan zaman yang semakin kompleks, ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, menuntut pesantren untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut.⁵

Berbagai regulasi untuk menghasilkan pendidikan berkualitas telah hadir sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, Dimulai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, setiap anak perempuan dan laki-laki harus memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata, dan bermutu⁶.

Hingga Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, yang menguraikan hak-hak penduduk Aceh untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut terselenggara guna meningkatkan standar mutu mereka sendiri sejalan dengan standar pendidikan Indonesia

Di era modern ini, masyarakat dihadapkan pada tantangan yang semakin beragam, seperti perubahan nilai sosial, peningkatan akses informasi, dan persaingan dalam dunia kerja. Hal ini mengharuskan pesantren tidak sekedar berperan sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan masyarakat. Maka dari itu, studi tentang kebijakan pengembangan pesantren menjadi sangat penting untuk

⁵ Mahbub Daryanto, 'Studi Kebijakan Pengembangan Pondok Pesantren (Evaluasi Kebijakan Di Provinsi Jambi)', *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*2, 2017.

⁶ Teguh Pradana, 'Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru', 2022, hlm. 1-113.

memahami bagaimana pesantren dapat berkontribusi secara maksimal dalam konteks pendidikan dan pembangunan sosial.⁷

Selain aspek pendidikan, pengembangan ekonomi pesantren juga menjadi perhatian penting. Banyak pesantren yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, namun masih terbatas dalam hal manajemen dan akses terhadap pasar. Kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial.⁸

Perkembangan pesantren dalam kerangka pendidikan agama diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 terkait Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, sehingga mereka berpotensi menjadi ulama dalam bidang keimanannya. Namun demikian, berdasarkan pengamatan di lapangan, terlihat bahwa pesantren kerap kali mengalami diskriminasi, seolah-olah keberadaannya tidak diakui dan lulusannya sering kali terabaikan. Lebih lanjut, lembaga-lembaga ini jarang mendapatkan pengakuan yang eksplisit dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Menanggapi tantangan tersebut, pengakuan terhadap pesantren mengemuka, yang berpuncak pada disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

⁷ Aep Tata Suryana and others, 'Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, 21.2 (2020), 273–86.

⁸ Marlina, 'Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2014), 117–34.

(DPR RI). Langkah legislatif ini diformalkan sebagai Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, dengan persetujuan yang terjadi pada sidang paripurna ke-10 masa sidang 2019-2020, yang berlangsung pada hari Selasa, 24 September 2019⁹.

Pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Dengan Pengesahan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh Memutuskan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi : Pendidikan dayah berfungsi sebagai lembaga khusus yang didedikasikan untuk organisasi pendidikan agama Islam yang berasal dari kitab kuning (Kutub Al-turats). Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah, membimbing mereka untuk menjadi mahir dalam pengetahuan agama Islam (Mutafaqqih Fiddin) atau untuk membekali umat Islam dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menumbuhkan cara hidup Islam dalam masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan dayah melibatkan penerapan berbagai elemen kerangka pendidikan dayah dalam jenis dan jenjang pendidikan dayah tertentu, memastikan bahwa proses pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan dayah yang dimaksudkan. Administrasi dan pengawasan pendidikan dayah melibatkan peraturan otoritatif oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota setempat, masyarakat, dan lembaga

⁹ Diana Handayani, 'Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019', *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16.1 (2022), 31–48 <<https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>>.

pendidikan dayah, memastikan bahwa proses pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan dayah yang dimaksudkan.

Kriteria yang ditetapkan bagi pendidik dayah merupakan tolok ukur dasar yang diturunkan dari standar menyeluruh bagi pendidik tersebut, ditambah dengan atribut dan keistimewaan unik yang melekat pada Aceh. Tenaga kependidikan adalah individu yang ditunjuk untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dayah.

Kurikulum berfungsi sebagai standar penting dalam kerangka pengajaran dan pembelajaran di lembaga pendidikan dayah, memastikan bahwa pengalaman pendidikan lebih terkonsentrasi, terukur, dan berorientasi pada tujuan.

Sistem informasi manajemen pendidikan dayah berfungsi sebagai sumber daya yang komprehensif, yang menawarkan data terperinci tentang pendidikan dayah. Ini mencakup informasi tentang satuan pendidikan, kurikulum, *thalabah*, pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sistem ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi ini.

Dasar qanun tersebut adalah pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah di Provinsi Aceh, dapat terlaksana secara ideal. Penyelenggaraan pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang

didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. memberikan pengertian dasar pengertian pendidikan Islam dan pendidikan Islam, peneliti mengacu pada penjelasan ahli, sebagai berikut, Muhammad Fadhil al-Jamal dalam Pendidikan Islam memiliki upaya untuk melaksanakan, mendorong dan mengajak siswa untuk hidup yang lebih dinamis dengan berlandaskan nilai-nilai dan Mulia.

Pendidikan Islam merupakan proses mempersiapkan generasi muda dalam mengisi peran, nilai islami dan pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi sebagai manusia dalam melakukan amalan di dunia dan menghasilkan pahala di akhirat suatu saat. Pendidikan Islam berorientasi pada dua sasaran yang terintegrasi yaitu dunia dan akhirat.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah Provinsi Aceh dilaksanakan secara Islami, mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Salah satu guru matematika yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam di madrasah merupakan realisasi dari implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada tahun 2025 ada sekitar 15 pesantren yang tersebar di Kabupaten Simeulue

Tabel: Nama-nama pesantren yang ada di Kabupaten Simeulue

No	Nama Pesantren	Alamat		Pimpinan/Tengku	Status
		Desa	Kecamatan		
1	Darul Aitami	Linggi	Simeulue Timur	Drs.Naskah Bin Kamar	Terpadu
2	Darul Maghfirah Al-Qur'ani	Kota Batu	Simeulue Timur	Ilham Amin	Terpadu
3	Bahjatul Ulum Al-Aziziyah	Air Dingin	Simeulue Timur	tgk.Ilyas	Salafiyah
4	Darussahabah	Labuah	Teupah Tengah	Fauzi	Terpadu
5	Tgk.Syekh Khaalilullah	Kuta Batu	Simeulue Tengah	Rajuand,SP d.I	Salafiyah
6	Ad-Zikhron	Ameria Bahagi a	Simeulue Timur	Ikram	Salafiyah
7	Ma'had Darul Qur'an	Suka Jaya	Simeulue Timur	Ali Mardan,S.P d	Terpadu
8	Ma'had Ashabil Qur'an	Suak Bulu	Simeulue Timur	Heriansyah, Lc	Terpadu
9	Madinatul Waliya	Ana'ao	Teupa Selatan	Maria Riski	Salafiyah
10	Al-Fatah	Kuta Batu	Simeulue Timur	Bustami	Salafiyah
11	Nurul Islam	Ganting	Simeulue Timur	Muhammad Dani	Salafiyah
12	Baitul Qur'an	KP.Aie	Simeulue Tengah	Sadriman	Terpadu
13	Miftahussalam Al-Islami	Air Pinang	Simeulue Timur	Firman Abdul Hakim	Terpadu
14	Raudatul Ma'wa Al-Aziziah	Busung Indah	Teupah Tengah	Muhammad Hanafih	Salafiyah
15	Babul Istiqomah	Kahad	Teupah Tengah	Muzakir Walid	Salafiyah

Sumber: Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah

Namun Dari 15 pesantren di atas ada 2 pesantren yang aktif tapi belum terdaftar izin operasionalnya, pesantren tersebut ialah Pondok Pesantren Ad-Zikhro dan Pondok Pesantren Babul Istiqomah.

Berdirinya sebuah Pesantren/Dayah pastinya memiliki syarat untuk diakuinya sebuah pesantren. Ada beberapa syarat pokok berdirinya sebuah Pondok Pesantren, Antara lainnya; (1) Memiliki pengurus yang jelas, (2) Memiliki Kyai/Guru yang bertanggung jawab, (3) Terdapat santri mukim (santri yang tinggal di pesantren), (4) Memiliki pondok atau asrama sebagai tempat tinggal santri, (5) Tersedia masjid atau mushalla untuk kegiatan ibadah, (6) Menyelenggarakan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.

Pemerintah Daerah Simeulue mengembangkan pendidikan pesantren dengan berbagai kebijakan yang mana kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah daerah menyatakan bahwa kebijakan memberikan bantuan dan dukungan pendanaan termasuk dana operasional dan modal usaha kemandirian pesantren agar pesantren lebih mandiri dan berkualitas dalam pelaksanaan pendidikan.

Namun adanya kebijakan-kebijakan tersebut belum membuat pesantren-pesantren di Simeulue berkembang seperti pesantren-pesantren yang ada di luar daerah yang mana masih banyak pesantren di daerah

tersebut mengalami kesulitan dalam pengembangannya,masih banyak tantangan dan hambatan yang dialami seperti:kurangnya pendanaan untuk membangaun dan memperbaiki sarana dan prasarana pesantren hingga kualitas pendidik.

Selain itu adapun beberapa pesantren di Kabupaten Simeulue yang dicabut izin operasionalnya dan dinyatakan tidak berlaku oleh direktur jendral pendidikan islam kementerian agama Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2024 karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,adapun beberapa pesantren tersebut sebagai berikut.

Tabel: Nama-nama pesantren yang dicabut izin operasionalnya

No	Nama Pesantren	Lokasi
1	Pesantren Syeh Banurullah	Kecamatan Teupah Barat
2	Pesantren Nurul Iman Mutiara	Kecamatan Simeulue Barat
3	Pesantren Nurul Maghfira	Kecamatan Teupah Selatan
4	Pesantren Babul Huda Udep Saree	Kecamatan Simeulue Timur

Sumber: aceh.kemenag.go.id

Pembekuan ini berdasarkan evaluasi yang menunjukan tidak terpenuhinya unsur penting seperti keberadaan Kiai,Santri Mukim,Pondok/Asrama,Mesjid/Mushala,dan Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah.

Sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam memajukan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Maka dari itu,perlu untuk mengembangkan lagi kebijakan terhadap pesantren-pesantren karena Pesantren ialah lembaga pendidikan

yang berperan dalam pembentukan karakter dan pengetahuan agama, menghadapi keterbatasan dalam jumlah lembaga dan ustadz bersertifikasi.

Situasi ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan yang diberikan, ditambah lagi dengan kurangnya bantuan infrastruktur dan akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Maka dari itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pesantren, serta mengembangkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat peran pesantren dalam menciptakan generasi yang kompeten dan berakhlak, sehingga berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan sosial dan pendidikan di Kabupaten Simeulue.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang muncul dari fenomena pengembangan pesantren di Kabupaten Simeulue meliputi beberapa aspek kritis yang perlu ditangani.

1. masih banyak pesantren-pesantren di kabupaten simeulue yang kurang berkembang meskipun ada kebijakan-kebijakan dalam pengembangan pendidikan berbasis pesantren. kurangnya perhatian dan penerapan kebijakan terhadap pesantren-pesantren di simeulue seperti kurangnya kualitas tenaga pendidik yang berdampak pada pemahaman dan penguasaan ilmu oleh santri.

2. kurangnya dukungan infrastruktur pendidikan, seperti fasilitas belajar yang layak, menjadi hambatan dalam menjalankan proses belajar mengajar yang efektif.

Selain dari pada itu, akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan bagi pengajar semakin memperburuk kondisi. Semua masalah ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang ada dan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran pesantren dalam pendidikan dan pembentukan karakter di Kabupaten Simeulue.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan daerah terhadap kualitas pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pesantren di Kabupaten Simeulue dalam upaya pengembangan infrastruktur, sumber daya pendidikan, dan aksesibilitas yang memadai bagi santri?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada konteks penjelasan diatas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji kebijakan pemerintah daerah terhadap kualitas pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Simeulue
2. Melihat hambatan yang dihadapi pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Simeulue dalam pengembangan pendidikan berbasis pesantren

Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan pesantren di Kabupaten Simeulue, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengelola pesantren, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pesantren, sehingga solusi yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan jumlah ustadz bersertifikasi. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pesantren dalam mengembangkan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang lebih baik, serta mendukung upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan agama bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar bermanfaat bagi pengembangan pesantren, melainkan bagi masyarakat luas dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan kompeten.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait pengembangan pendidikan agama di Indonesia, terutama dalam konteks pesantren. Studi ini pun dapat berkontribusi dalam pengembangan teori-teori pendidikan dan kebijakan publik dengan menyoroti dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh pesantren di daerah terpencil seperti Kabupaten Simeulue. Selain dari pada itu, temuan studi ini pun bisa dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aspek-aspek berbeda dari

pengembangan pesantren, seperti manajemen, kurikulum, dan inovasi pendidikan. Dengan itu, penelitian ini bukan hanya menambah wawasan akademis, namun juga memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan model kebijakan yang lebih **responsif** terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah-wilayah serupa.

